KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Lindungi tenaga kesehatan, DPR minta sisrem magang dokter muda ditata ulang
Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Lindungi Tenaga Kesehatan

DPR Minta Sistem Magang Dokter Muda Ditata Ulang

muda yang tengah magang atau internship dalam tiga bulan terakhir. Senayan minta dilakukan reformasi sistem magang agar tenaga medis terlindungi.

RABU (20/5/2026), Komisi IX DPR menggelar rapat dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, dan Ketua Paguyuban Alumni RKL SPKKLP IKA FK UNSRI di Gedung Parlemen, Senayan. Salah satu yang dibahas terkait internship dokter.

Anggota Komisi IX DPR Achmad Ruchyat mengusulkan, pertemuan ini ditindaklanjuti dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar apa yang disampaikan serta rekomendasi Komisi IX benar-benar diterima. "Peristiwa wafatnya 4 dokter jadi evaluasi bahwa beban dokter di lapangan perlu ditata ulang," ujarnya.

Dia menegaskan, keselamatan pasien memang harus dijaga, tetapi keselamatan dokter juga tidak boleh diabaikan. Regulasi yang jelas perlu memastikan dua hal itu berjalan bersama. "Supaya dokter tidak dibebani kewajiban menjaga pasien tanpa jaminan keamanan bagi dirinya sendiri di setiap tahap pelayanan," tegasnya.

Senada, anggota Komisi IX DPR Gamal Albinsaid menilai, wafatnya empat dokter magang ini merupakan fenomena gunung es yang mencerminkan rapuhnya tata kelola pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Di lapangan, dokter kerap menghadapi beban kerja berat dan situasi dilematis tanpa sistem pengganti yang jelas.

Dia juga menyoroti risiko fisik yang nyata akibat kelelahan ekstrem setelah menjalani tugas yang panjang di lapangan, termasuk ancaman *micro sleep* saat berkendara pulang setiap malam. Kondisi itu sangat membahayakan nyawa para dokter yang masih harus menempuh perjalanan jauh menuju rumah.

Sebagai solusi konkret, dia mendorong Komisi IX DPR segera mengambil langkah politik formal dengan membentuk Panitia Kerja (Panja). "Instrumen itu diharapkan memberi tindak lanjut yang konkret, efektif, dan praktis untuk mengurai persoalan dalam layanan kesehatan yang terus menumpuk di lapangan kerja sehari-hari," ujarnya.

Menanggapi usulan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan, pihaknya membuka peluang membentuk dua Panja untuk mengurai berbagai persoalan krusial di dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan dasar. Langkah ini diambil merespons aspirasi para dokter yang butuh penanganan lintas kementerian secara cepat.


FOTO: DPR.GO.ID

Achmad Ruchyat

Charles menjelaskan, jatah Panja di bidang kesehatan ada dua. Jika sudah ada satu usulan Panja terkait reformasi di bidang internsip, maka satu lagi bisa diisi dengan Panja pengelolaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Nantinya, ini termasuk kesejahteraan dokter-dokter di Puskesmas yang melayani masyarakat secara langsung.

Isu kelanjutan pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, kata Charles, juga berpotensi masuk dalam ruang lingkup kerja Panja pengelolaan FKTP.

"Pembentukan Panja akan memperkuat daya tawar DPR dalam mengawal kebijakan dan memanggil kementerian teknis lain di luar Kemenkes secara formal," terangnya.

bagai organisasi itu, Charles mencatat ada empat permasalahan utama yang mendesak untuk diperjuangkan bersama parlemen dan organisasi profesi. Persoalannya mencakup nasib ribuan calon dokter retaker yang terancam *drop out*, kematian dokter internship, kesejahteraan dokter di Puskesmas, dan kepastian sertifikat Sp.KKLP.

Dia memastikan, seluruh masukan dari perwakilan dokter dan mahasiswa kedokteran sangat berharga dan jadi modal dasar Komisi IX menjalankan fungsi pengawasan. "Setiap saran yang disampaikan akan dipakai sebagai bahan memperjuangkan empat persoalan itu secara bersama-sama melalui langkah lanjutan di DPR kelak," ucapnya.

Sebagai informasi, empat dokter magang yang wafat diduga akibat beban kerja yakni Myta Aprilia Azmy di Jambi, awal bulan ini, dan Andito Mohammad Wibisono di Cianjur, April lalu. Lalu Karika Ayu Permatasari di Surabaya serta Edgar Bezaliel Hartanto di RS Bhayangkara, Denpasar, Maret 2026.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengakui, banyak yang harus dibereskan dari pelaksanaan program internship di Tanah Air, dengan evaluasi di berbagai layanan. Pemerintah tidak ingin ada lagi dokter muda yang mengalami tekanan akibat budaya kerja yang tidak sehat selama proses pendidikan dan pemahiran profesi.

tapkan sejumlah langkah perbaikan untuk pelaksanaan program internsip dokter di seluruh fasilitas layanan. "Pemerintah tidak ingin ada lagi dokter muda yang mengalami tekanan akibat budaya kerja tidak sehat selama proses pendidikan dan pemahiran profesi di Tanah Air," ucapnya.

Langkah pertama, pengaturan jam kerja peserta internship diperjelas dengan batas maksimal 40 jam per minggu dan tidak boleh dipadatkan atau dirapel. Pemerintah tidak ingin ada lagi dokter muda yang sakit, apalagi wafat, karena pola kerja yang tidak manusiawi dalam praktik lapangan sehari-hari.

Kedua, Kemenkes menegaskan peserta internship bukan pengganti dokter organik di rumah sakit dan wajib mendapat supervisi aktif dari dokter pendamping. Ketiga, Pemerintah akan memperbaiki remunerasi peserta *internship*, sementara hak cuti ditingkatkan dari empat hari menjadi 10 hari tanpa kewajiban mengganti masa *internship*.

Kemenkes juga membentuk tim investigasi gabungan yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kemenkes, Ditjen SDM Kesehatan, Ditjen Kesehatan Lanjutan, IDI, PAPDI, serta Ikatan Alumni FK Universitas Sriwijaya. "Investigasi dilakukan dengan mendengar peserta internship, dokter pendamping, manajemen rumah sakit, hingga keluarga almarhum secara langsung," tandasnya. ■ PYB